



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Alloh SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perjalanan Tahun keempat dari Renstra Tahun 2021-2026. Selanjutnya pembuatan LKIP adalah menindaklanjuti Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya menguraikan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan beberapa kinerja yang pencapaiannya belum maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun – tahun sebelumnya.

Dengan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat , relevan dan transparan sehingga pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2025, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Tahun 2025, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Sariwangi, 22 Januari 2026
Kepala Kecamatan Sariwangi,

RAHMAT, S.Sos.,M.Si
NIP. 19680604 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
B. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	2
C. Isu Aktual.....	6
D. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	13
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja	13
tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir	
3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai	
dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai	
dengan perencanaan rencana strategis.....	14
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	15
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan	
/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	16
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	18
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 113 Tahun 2016 Tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

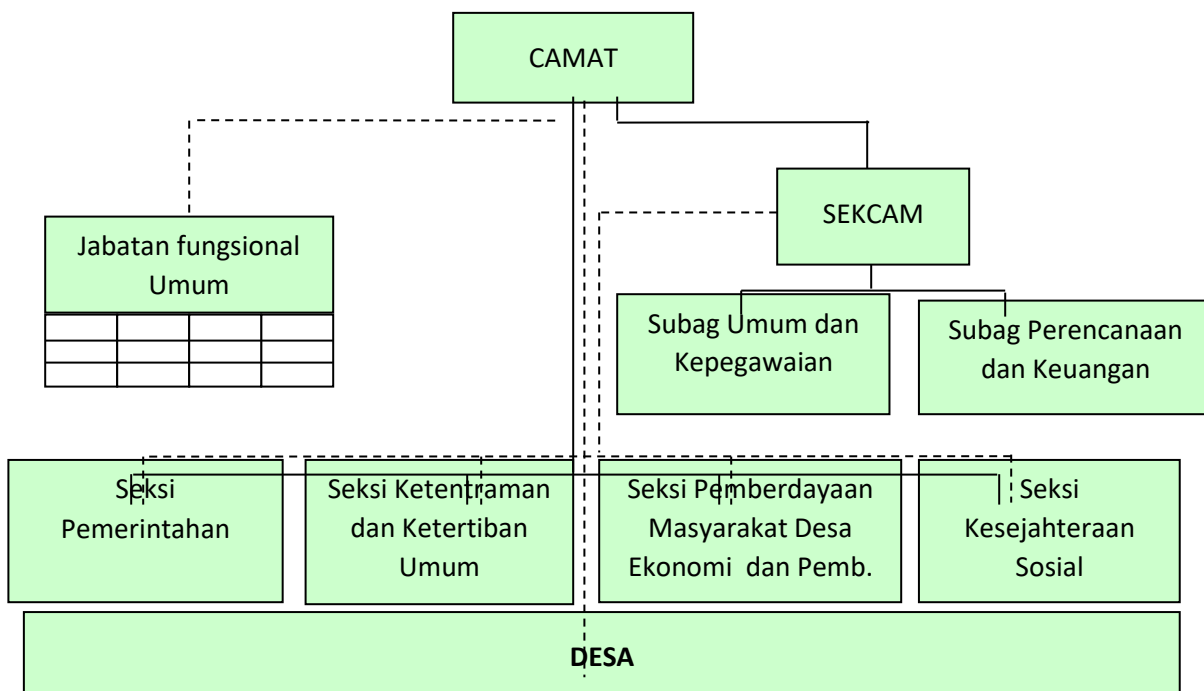
Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sariwangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 pasal 89 tentang Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini .



Sumber : Perbup No.119 Tahun 2021

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sariwangi

1.2.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sariwangi

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sariwangi

Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Sariwangi Tahun 2025

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	10
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3
		d. Diploma	1
		e. S1	9
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	6
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. Non ASN	5
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sariwangi Tahun 2025

1.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sariwangi

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sariwangi.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Sariwangi Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Ringan
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Sedang
Kendaraan			
4	Kendaraan Roda 4	2	Sedang/Rusak Ringan
5	Kendaraan Roda 2	6	3 Sedang/3 Rusak Ringan
Non Kendaraan			
6	Personal Computer (PC)	3	Sedang
7	Laptop	3	Sedang
8	Printer	1	Baik/Sedang
9	Faximile	1	Baik
10	Scanner	-	-
11	Camera	1	Sedang
12	Wereless	-	-
13	Lemari	4	Rusak Ringan
14	Filling Kabinet	1	Rusak
15	Zice	2	Sedang
16	Tempat tidur kayu	1	Rusak Berat
17	Meja Tulis	10	Sedang
18	Meja podium	1	Sedang
19	Meja Rapat	1	Baik
20	Kursi Rapat / lipat	40/35	Sedang
21	Kursi Putar	2	Sedang
22	Proyektor	1	Baik
23	CCTV	1	Rusak
24	Televisi	1	Rusak Berat

C. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sariwangi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sariwangi dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya adalah;

1. Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Sariwangi dalam memberikan pelayanan publik yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal;
4. Masih rendahnya profesionalisme kinerja aparatur;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, dimana pendahuluan berisi :

- A. Struktur Organisasi
- B. Aspek Kepegawaian dan Srana Prasarana
- C. Isu Aktual
- D. Sistematika penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran stratgis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organissi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

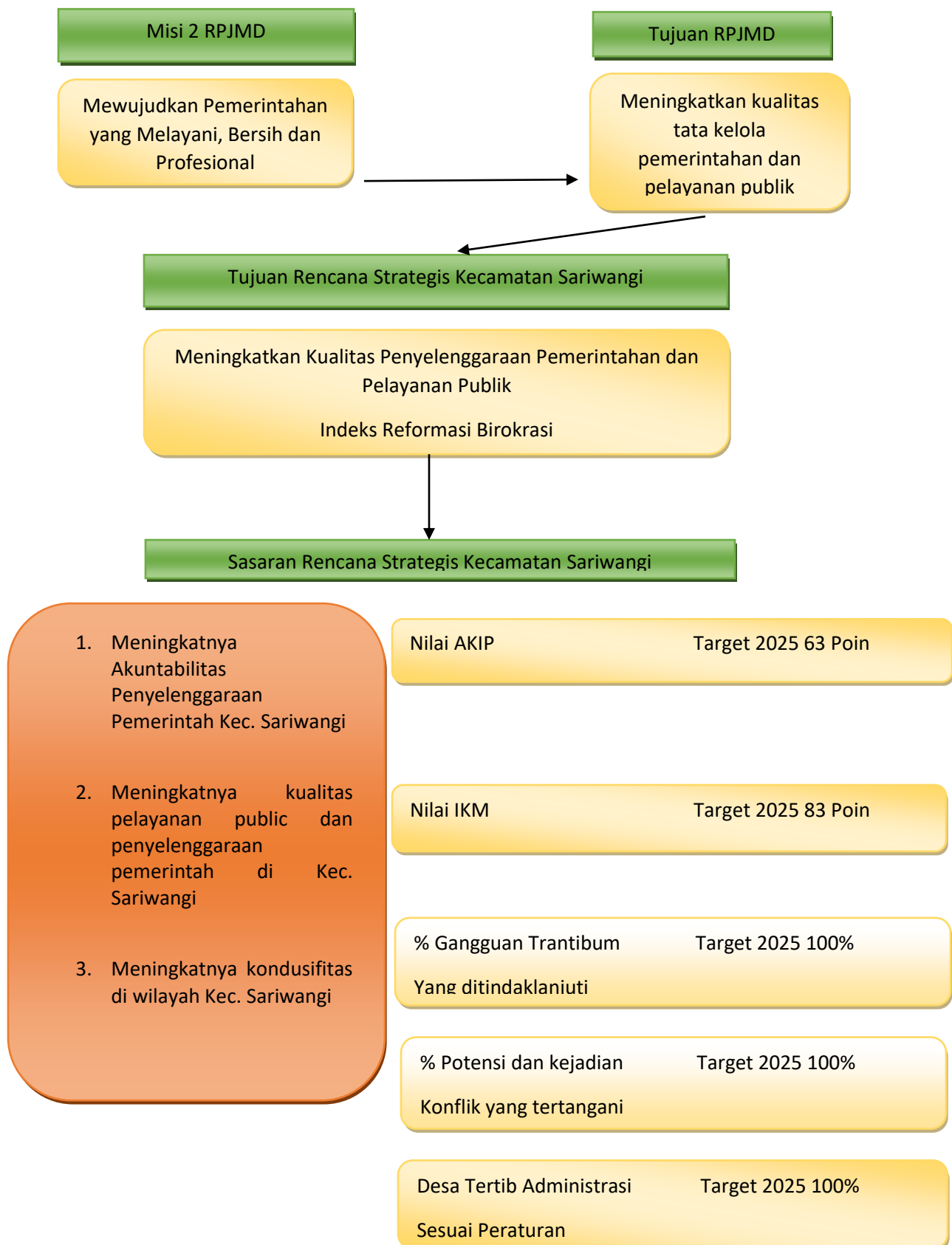
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Sariwangi Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Poin	80,09	81	81	82,00	82,05	83	83,05	83,05
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Perjanjian Kinerja

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dari pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujudnya akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, Secara terperinci perjanjian kinerja Kecamatan Sariwangi tahun 2025 yang mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	63 B
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,5
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

- Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya, menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

- Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sariwangi dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Sariwangi telah melaksanakan penilain kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020

Pengukuran target kinerja, realisasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja Tahun 2025 dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	63	66,65 (Realisasi Tahun 2024)	105,79 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	83	85,57	103,09 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100%	100 %	Sangat Tinggi

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	66,65	105,79%	66,65	109,26%	62,5	104,17%
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,57	103,09%	85,38	104,06%	85,15	103,84%
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Renstra
1	2	3	4	5	6

1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	66,65	71 BB	106,53%
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,57	81,95	95,77%
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	66,65	-	-
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan Sariwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	85,57	-	-
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	-	-

		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	-	-
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	-	-

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 5 indikator kinerja menunjukkan sebanyak 5 indikator kinerja tersebut termasuk ke dalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut :

a.Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sariwangi

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Kecamatan Sariwangi memperoleh nilai angka sebesar 66,65 poin atau kategori B dengan capaian 105,79%. Sedangkan untuk hasil evaluasi Tahun 2025, Kecamatan Sariwangi belum memperoleh nilai karena belum dilaksanakan penilaian oleh Inspektorat, sehingga yang kami cantumkan capaian nilai Tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah bahwa pada Tahun 2024 implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sariwangi sudah baik.Hal-hal yang menyebabkan target nilai AKIP dapat tercapai karena melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Sariwangi dan melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Sariwangi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sariwangi

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menerangkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sariwangi Tahun 2025 yaitu 85,57 poin kategori baik (B) dari target 83 poin dengan capaian kinerja 103,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu 85,38 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,19. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan publik dari Tahun 2020 hingga 2025.

Tercapainya target tersebut karena adanya upaya peningkatan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respon positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Dan telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sariwangi

Sasaran ke-3 ini memiliki 3 indikator :

1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

Tercapainya target indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh perangkat Kecamatan Sariwangi. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sariwangi sehingga menciptakan Kecamatan Sariwangi yang aman, tentram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

Tercapainya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Sariwangi. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Sariwangi yang aman, tentram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dari target 100% realisasinya 100% dengan capaian 100% dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 dari target 100% tercapai 100% dengan kategori sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

Tercapainya target indikator ke-3 dari sasaran ke-3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sariwangi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sariwangi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3. 6 .

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Tahun Anggaran 2025 masuk kategori sangat tinggi yaitu sebesar 101,02% dan realisasi anggaran sebesar 95,84% ada efisiensi sebesar 8,03% antara kinerja dan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian sasaran pada Tahun 2025 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6
Capaian Target Kinerja Dan Efisiensi Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	63	N/A	N/A	1.634.121.883	1.489.227.157	91,13
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	82,05	85,38	104,06%	67.610.000	59.970.000	88,70
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	157.525.000	157.102.600	99,73
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	25.000.000	24.915.000	99,66
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	21.945.000	21.945.000	100,00
	Rata-rata				101,02%	1.906.201.883	1.753.159.757	95,84
	Efisiensi		8,03%					

B. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sariwangi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Sariwangi Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.7

TABEL 3.7
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Uru san	Bidang Urusan	Progr am	Kegia tan	Sub Kegia tan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.906.201.883	1.753.159.757	92
7	1				KECAMATAN	1.906.201.883	1.753.159.757	92
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.634.121.883	1.489.227.157	91
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.445.070.883	1.315.520.317	91
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.445.070.883	1.315.520.317	91
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.443.000	67.329.800	100
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.512.000	32.410.800	100
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.649.000	5.649.000	100
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.212.000	4.200.000	100
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	7.200.000	100
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.870.000	17.870.000	100
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.200.000	37.241.040	93
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000	10.241.040	78
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.000.000	27.000.000	100
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.408.000	69.136.000	85

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	47.764.900	80
7	1	1	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.408.000	21.371.100	100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.610.000	59.970.000	89
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.120.000	20.120.000	100
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.120.000	20.120.000	100
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	11.750.000	11.750.000	100
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11.750.000	11.750.000	100
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.740.000	28.100.000	79
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	35.740.000	28.100.000	79
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	157.525.000	157.102.600	100
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	157.525.000	157.102.600	100
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	157.525.000	157.102.600	100
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.915.000	100
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.915.000	100
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.915.000	100
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.945.000	21.945.000	100
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.945.000	21.945.000	100
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6.730.000	6.730.000	100

7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Pembangunan	Penyusunan Partisipatif	Perencanaan	15.215.000	15.215.000	100
---	---	---	------	----	---------------------------	----------------------------	-------------	------------	------------	-----

Berdasarkan Tabel 3.7 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sariwangi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.753.159.757, 00 atau sebesar 92% dari total anggaran sebesar Rp. 1.906.201.883, 00. Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategi Kecamatan Sariwangi sebagaimana pada Tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Realisasi Program Yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Sariwangi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Sariwangi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.634.121.883	1.489.227.157	91,13
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	67.610.000	59.970.000	88,70
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Sariwangi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	157.525.000	157.102.600	99,73
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	24.915.000	99,66
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.945.000	21.945.000	100,00
	Jumlah			1.906.201.883	1.753.159.757	88,41

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sariwangi dalam Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sariwangi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Sariwangi dalam memberikan pelayanan publik yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja , semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, aparatur Kecamatan Sariwangi berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sariwangi, 22 Januari 2026

Camat Sariwangi



H. MAMAT RAHMAT, S.Sos., M. Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19680604 199403 1 005

